

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi BPUM di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan komunikasi baik yang berhubungan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi secara baik untuk kelancaran implementasi BPUM meskipun sosialisasi tidak dilakukan secara masif.
2. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan penyediaan sumberdaya meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas yang dirasa sudah cukup karena implementasi kebijakan ini tidak memerlukan sumberdaya yang banyak.
3. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan pendisposisian meliputi kognisi, arahan dan respons cukup baik meskipun kecepatan respons pegawai biasa saja.
4. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah mengikuti aspek struktur birokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku melalui pemberlakuan *Standard Operating Procedure (SOP)* pada pelaksanaan BPUM.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Implementasi BPUM ini sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara masif agar informasi mengenai BPUM bisa sampai ke masyarakat, untuk memaksimalkan pendataan secara jelas karena belum tentu warga bisa menggunakan media sosial.
2. Dalam penyampaian informasi sebaiknya instansi membuat pamflet sendiri atau poster agar masyarakat lebih jelas dalam menyiapkan berkas.
3. Perlunya upaya instansi untuk mendata lebih cermat dengan terjun ke lapangan, hal ini untuk meningkatkan transparansi terhadap warga yang ingin mendaftar.
4. Perlunya pengawasan bagi warga yang mendapatkan, dikarenakan dari pusat tidak bisa memantau perkembangan UMKM yang mendapat BPUM ini maka dari itu dari pihak pengusul harus melakukan pemantauan agar bantuan ini bisa tepat sasaran.